

Judul : Asumsi Makro RAPBN 2018 Ditetapkan
Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 11

Asumsi Makro RAPBN 2018 Ditetapkan

● SAPTO ANDIKA CANDRA,
INTAN PRATIWI

Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

JAKARTA — Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui asumsi dasar makro yang akan dijadikan sebagai dasar pembahasan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksikan berada pada level 5,2-5,6 persen.

Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah mengatakan, selain proyeksi pertumbuhan ekonomi, rapat panitia kerja asumsi dasar juga telah menyetujui tingkat inflasi pada kisaran 2,5 hingga 4,5 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 dolar AS - 55 dolar AS per barel, dan surat perbendaharaan negara (SPN) 4,8 hingga 5,6 persen. "Sedangkan, asumsi nilai tukar rupiah Rp 13.300 hingga Rp 13.500 per dolar AS," kata Said, Rabu (14/6).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen sudah cukup mewakili optimisme pemerintah sekaligus kehati-hatian dalam menghadapi risiko eksternal dan internal. Tak hanya itu, rentang harga mi-

nyak Indonesia juga dianggap cukup menjawab tantangan global lantaran harga minyak sangat rentan dengan pergerakan politik dunia dan besaran permintaan atas minyak mentah. "Kami cukup yakin pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di kisaran yang ditetapkan," kata Suahasil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal lebih tinggi karena iklim investasi membaik. Apalagi, Indonesia kini telah mendapatkan peringkat layak investasi dari semua lembaga pemeringkat ternama dunia.

"Kita juga mulai mengarah ke ekspor dari sumber daya alam harganya mulai membaik. Kami juga percaya risiko fiskal semakin berkurang," katanya.

Darmin mengatakan, investasi akan meningkat karena investor di dunia menganut aturan bahwa dana investasi hanya bisa mengalir ke negara-negara yang sudah memiliki peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat besar dunia, yakni Fitch Ratings, Moody's, dan Standard and Poor's (S&P).

Negara-negara seperti Jepang dan kawasan Eropa, lanjut Darmin, sangat berhati-hati dalam menanamkan investasinya di surat berharga, terutama bila menggunakan dana pensiun.

Ia mengungkapkan, selama ini bila ada investor atau pengelola investasi yang memilih berinvestasi di Indonesia lebih karena keberanian dalam berspekulasi saja.

Indonesia berpeluang mengakses dana

investasi sebesar 700 miliar dolar AS. Hal ini setelah lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor's (S&P), memperbaiki *rating* utang Indonesia dari BB+ ke BBB- memberi peluang Indonesia untuk menawarkan surat berharganya.

S&P juga menaikkan opininya atas Indonesia menjadi layak investasi. Perbaikan *rating* yang diberikan S&P ini sekaligus melengkapi perbaikan *rating* yang sebelumnya diberikan oleh Fitch dan Moody's.

Dia menambahkan, pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia berkualitas. Maksudnya, jelas Darmin, pertumbuhan ekonomi harus berpengaruh terhadap pemerataan, penurunan angka pengangguran, dan inflasi yang terjaga rendah.

"Pertumbuhan tidak perlu tinggi-tinggi amat, asalkan tingkat pengangguran turun, kemiskinan turun, rasio gini turun, inflasi turun. Harus komplet bisa disebut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujarnya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat menunjukkan tren penurunan pada 2013 hingga 2015 disebabkan oleh isu kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) dan harga komoditas ekspor Indonesia yang anjlok, terutama perkebunan dan pertambangan.

Kondisi ini mulai berubah sejak 2016 lantaran ekonomi AS mulai stabil dan berimbas pada iklim ekonomi dunia dan Indonesia. ■ ed: satria kartika yudha